

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Literatur Review**

Penulis membagi penelitian ke dalam tiga pokok pembahasan yakni hubungan kedua negara antara Indonesia dengan Singapura dalam luang linkup Kerjasama ekonomi Free Trade Zone dan diingiri dampaknya akibat perdagangan internasional antar ke dua negara serta meninjau apa saja yang menjadi faktor yang penghambat Kerjasama ekonomi ke dua negara.

Ada beberapa literatur yang membahas tentang Kerjasama ekonomi Indonesia dengan Singapura yang pertama penelitian yang ditulis oleh Dessy Arjuna, ia meneliti tentang realisasi kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura di Kawasan Ekonomi terutama di pulau Batam, Bintan, dan Karimun. Dalam penelitiannya Batam yakni kawasan yang ditetapkan untuk menjadi daerah tujuan investasi, termasuk penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri oleh pemerintah. Adanya daya dukung dengan “letak Batam yang strategis, di dekat Malaysia dan Singapura merubah Batam sebagai salah satu ruang berinvestasi yang menguntungkan” (Arjuna, 2013).

Pengembangan kawasan ekonomi khusus merupakan salah satu strategi Indonesia untuk meningkatkan investasi langsung di dalam negeri. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode analisis induktif yang dapat menemukan fakta dan pemecah masalah berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel, media massa, internet, dan situs web yang terkait dengan penelitian, dll. Tempat penelitiannya berada di Pulau Batam, Bintan dan Karimun Kepulauan Riau. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya realisasi dari kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura di kawasan ekonomi khusus, antara lain: penandatanganan framework agreement untuk kerjasama ekonomi di berbagai sektor seperti investasi, dan perdagangan bebas dan pembentukan free port zone. Realisasi investasi Singapura di Indonesia sejak 2010 sampai kuartal I 2015 yakni US\$28,35 miliar dolar. Pada 2015, realisasi investasi Singapura mencapai US\$2,5 miliar dolar. Di bidang perdagangan, Indonesia dan Singapura membentuk Joint Investment Promotion untuk mempromosikan Batam, Bintan dan Karimun ke negara-negara di Asia Timur. Kemudian dalam penelitiannya Dessy menemukan bahwa di bidang ketenagakerjaan, kedua

pemerintah menyelenggarakan Tripartit Workshop on Manpower Management, dan berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing caregiver dan perawat asal Indonesia.

Selain penelitian dari pada itu Nur Muhammad Bagus Harpiandi melakukan penelitiannya yang berkaitan dengan Kerjasama Ekonomi Indonesia-Singapura namun dalam aspek digitalisasi. Penelitiannya mengandung tujuan untuk mengetahui proses kerjasama Indonesia-Singapura di bidang ekonomi digital yang disepakati pada tahun 2017. Objek penelitiannya yakni terletak pada hubungan kerjasama bilateral yang tercipta antara negara Indonesia dengan Singapura ataupun kondisi ekonomi digital dari kedua negara tersebut. Dalam hal ini peneliti berharap mampu memberikan pemahaman dan analisis secara tepat terkait kerjasama kedua negara yang berlangsung tersebut juga dampak yang ditimbulkan terhadap ekonomi digital bangsa Indonesia. Harpani menyetakan bahwa melalui metode kualitatif dan tekni analisis deskriptif yang ditunjang dengan kajian literatur dan sebagainya diperleh suatu data yang kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada yakni teori mengenai ekonomi digital, kepentingan nasional, hubungan internasional, globalisasi, dan kerjasama bilateral.

Teori ilmiah mengenai hubungan internasional merupakan hal yang diambil oleh peneliti dan digunakan sebagai bentuk konseptualisasi suatu gagasan ke dalam bentuk skripsi. Kemudian, sebagai tambahan teori globalisasi maupun ekonomi digital juga digunakan sebagai cara dalam melakukan analisis terkait proses terbentuknya ekonomi digital. Hasil penelitian yang didapatkan yakni kondisi ekonomi digital yang ada di Indonesia masih tergolong baik terutama terkait potensi dan prospek yang dimiliki. Namun, hasil juga menunjukkan adanya

suatu kendala mendasar yakni regulasi maupun pemodalannya bagi para pelaku *e-commerce*. Adanya hubungan kerja sama antara Singapura dan Indonesia ini akan menguatkan sektor ekonomi digital yang dicapai dengan pendidikan sehingga mampu memperoleh hasil yang positif serta bentuk kerjasama yang berkembang dan berkelanjutan (Nur Muhamad Bagus Harpiandi, 2017).

Kemudian penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Astrid Pratiwi yang berjudul “Kerjasama Singapura-Indonesia Dalam Kawasan Industri Di Sektor Manufaktur: Studi Kasus Kawasan Industri Kendal Periode 2016-2017”. Pada penelitian ini dianalisis mengenai kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Singapura terutama pada hubungan bilateral mengenai bidang ekonomi terutama pada kawasan Industri yakni Kendal. Kendal ini pun disebut sebagai wilayah Industri yang tercipta dari kolaborasi dua negara dimana mampu menciptakan produk manufaktur. Untuk menganalisis problematika di atas dipelrukan teori mengenai kerjasama ekonomi bilateral, kemudian konsep kawasan industri dan ekonomi digital. Teori tersebut digunakan dengan tujuan menjada alat analisis untuk meningkatkan pemahaman terkait objek penelitian, yakni hubungan kerjasama ekonomi bilateral yang tercipta antara Indonesia dan Singapura serta memberikan sorotan pada upaya pelaksanaan kerja sama tersebut dalam bentuk kesepakatan kerja sama, langkah investaris, perekrutan tenaga kerja, dan berbagai kesepakatan lainnya untuk masa mendatang. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia maupun Singapura dapat dijadikan sebagai jalan komitmen dimana apabila mendapatkan kesepakatan dari para elit politik mampu mendorong berbagai langkah investasi dari Pemerintah Singapura. Tidak hanya itu, akan ada banyak daya tarik sehingga meningkatkan keterlibatan berbagai pihak swasta untuk menjalankan kolaborasi pada kegiatan industri maupun adanya rekrutmen tenaga kerja ataupun produksi dari manufaktur yang dihasilkan (Astrid Pratiwi, 2011).

## **2.2 Kerangka Teoritis**

Pembahasan penelitian ini, penulis akan menambahkan mengenai teori-teori yang relevan dengan hal-hal yang terkait praktikum penulis, sehingga akan ada

relevansi antara apa yang dituangkan penulis dalam prarikum dengan semua teori yang akan dipakai.

### **2. 2. 1 Ekonomi Politik Internasional**

Ekonomi Politik Internasional secara khusus fokus pada distribusi keuntungan dari aktivitas pasar; ekonomi neoklasik tidak. Meskipun, setidaknya dalam jangka panjang, setiap masyarakat memperoleh keuntungan yang bersifat mutlak dari berfungsinya pasar internasional secara efisien, adanya keuntungan tersebut memang tidak sering dilakukan distribusi secara merata di antara semua pelaku ekonomi. Negara pun pada umumnya sangat memperhatikan mengenai keuntungan yang bisa diperoleh secara mandiri oleh mereka sendiri.

Sementara para ekonom menganggap pasar sebagai mekanisme pengaturan diri yang terisolasi dari urusan politik, para ahli dalam IPE tertarik pada fakta bahwa ekonomi dunia mempunyai dampak cukup besar pada kekuatan, nilai, dan otonomi politik masyarakat nasional. Negara memiliki insentif yang kuat untuk mengambil tindakan yang melindungi nilai dan kepentingan mereka sendiri, terutama kekuatan dan kebebasan bertindak mereka, dan mereka juga berusaha untuk memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh mereka atas negara saingan atau untuk mendukung negara sahabat (Gilpin & Gilpin, 2011).

Tiga pendekatan teoretis yang luas umumnya digunakan untuk mengkaraktisasi politik ekonomi internasional, baik dalam hal pemahaman kebijakan pemerintah *vis a vis* sistem global dan fungsi sistem secara keseluruhan itu sendiri. Dalam hal ini pendekatan dalam melihat interaksi negara sebagai pelaku ekonomi dapat ditinjau melalui Merkantilisme, Liberalisme dan Marxisme Ekonomi sebagai pendekatan pemerintah dan ini dijelaskan lebih lanjut di bagian ini selain menguraikan teori luas ketiga IPE; Marxisme (Lim, 2014). Namun pada penelitian ini, penulis akan focus pada pendekatan Liberisme.

### **2. 2. 1. 1 Neo-Liberalisme**

Neoliberalisme tentu saja tidak sama luasnya dengan ekonomi global. Hal ini mengambil bentuk pasar dunia yang beraneka ragam dan didasarkan pada interaksi dalam ruang arus diartikulasikan ke varietas kapitalisme regional dan nasional dan bentuk-bentuk organisasi ekonomi lainnya. Logika persaingan berorientasi pada keuntungan, pasar yang dimediasi dalam ekonomi dunia, dan memperkuat pengaruh dinamika pasar dunia dalam masyarakat dunia secara lebih umum (Jessop, 2017).

Kecenderungan-kecenderungan ini terutama terkait dengan promosi liberalisasi, deregulasi, privatisasi, perluasan proksi pasar di sektor negara sisa, internasionalisasi, dan penurunan pajak langsung. Seiring dengan komitmen terhadap nilai pemegang saham, ini menguntungkan modal keuangan hypermobile, memperkuat daya saingnya dan meningkatkan kemampuannya untuk memindahkan dan mengalihkan masalah ke pelaku dan kepentingan ekonomi lain, sistem lain, dan lingkungan alam. Terlepas dari berlalunya titik puncak neoliberal, ada efek ketergantungan jalur yang signifikan dari kecenderungan krisis yang terkait dengan setiap bentuk dan pertemuan sementara mereka. Efek ini bersifat politis dan ideologis serta ekonomi (Farny, 2003). Hal ini terbukti dalam cara kebijakan neoliberal telah membentuk bentuk, waktu, dan dinamika krisis ekonomi (dipahami secara luas) tidak hanya di negara-negara di mana neoliberalisme diadopsi, dipaksakan, atau diadaptasi, tetapi juga di tempat lain.

### **2. 2. 1. 2 *Free Trade***

Seperti yang telah dibahas, neo-liberalisme pada dasarnya adalah kepercayaan pada perdagangan bebas. Ini merupakan minimalisasi keterlibatan pemerintah dalam urusan perdagangan internasional agar pelaku usaha tidak dibatasi ekspor barangnya dan impor dari negara lain tidak dibatasi oleh tindakan proteksionis (Farny, 2003).

### **2. 2. 1. 3 *Invisible Hand***

Adam Smith mengilustrasikan tesisnya bahwa membebaskan perdagangan internasional menguntungkan semua dengan metafora 'tangan tak terlihat'. Tangan tak terlihat mengacu pada apa yang sekarang lebih dikenal sebagai 'kekuatan pasar', yang berarti cara bisnis dan perdagangan beroperasi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sebagai balasan langsung terhadap kekhawatiran Konservatif (dan Mercantilis) bahwa ekonomi yang tidak diatur mengarah pada anarki dan eksploitasi karena individu yang serakah memperkaya diri mereka sendiri tanpa memperhatikan penderitaan yang mungkin ditimbulkan pada orang lain, tangan tak terlihat berpendapat bahwa masyarakat akan lebih baik tanpa campur tangan pemerintah karena inilah yang mendistorsi kecenderungan alami orang untuk bekerja sama, bertukar barang dan menghasilkan uang. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian, alih-alih melindungi warganya, justru semakin memiskinkan mereka dengan menghambat potensi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan sesama warga negara. Pemerintah yang berhati-hati enggan mengizinkan impor ke negara mereka, karena takut mengekspos industri dalam negeri mereka ke persaingan yang lebih murah dan lebih memilih untuk berjuang untuk swasembada, berfungsi untuk mengurangi keseluruhan volume perdagangan internasional. Sebagai konsekuensinya, warga negara dibiarkan membayar lebih dari yang seharusnya mereka bayar untuk barang-barang yang diperdagangkan di pasar dunia terbuka dan menderita karena jumlah keseluruhan uang yang dapat dihasilkan dari perdagangan dibatasi secara artifisial. Dalam contoh apa yang dikenal sebagai masalah barang kolektif pemerintah yang mementingkan diri sendiri, atas nama melindungi warganya sendiri, sebenarnya merugikan mereka dengan hati-hati (contoh lain dari barang kolektif) (Lim, 2014).

**“Hubungan Internasional ialah hubungan yang dilaksanakan antar negara, yang dapat didefinisikan sesuai territorial, populasi dan otonomi wilayah yang juga secara efektif mengontrol daerah dan penghuninya. Hub-**

**ungan Internasional melingkupi semua bentuk antar bangsa dan semua kelompok bangsa dalam penduduk dunia, semua kekuatan, semua tekanan dan tahapan penentuan cara hidup, berbuat serta berfikir” (Coulombis & Wolfe, 1990: 2)**

Kerjasama Internasional ialah dampak dari globalisasi. Integrasi ekonomi itu timbul pada waktu kendala dalam perdagangan diminimalkan dan dihilangkan dalam peningkatan investasi perdagangan internasional dari luar negara. Hal itu pun timbul selaras dengan ditanda tangani perjanjian antara negara yang memperkenalkan perdagangan bebas.

## **2.2.2 Bentuk Kerjasama Internasional.**

### **2. 2. 2. 1 Kerjasama Bilateral**

Kerjasama Bilateral yakni kerjasama yang dilaksanakan oleh 2 negara saja. Kerjasama bilateral tentu hanya mengikat dua negara yang melaksanakan kemitraan tersebut. Kerjasama tersebut bisa terjadi disebabkan dua negara saling memperoleh keuntungan karena mereka mempunyai korelasi yang baik. Seperti: Indonesia-Arab Saudi, mengenai tenaga kerja, pertukaran pelajar, atau dibidang lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan demikian, diplomasi telah menjadi multidisiplin, dinamis, dan operasional di banyak tingkatan. Namun terlepas dari transformasi, fundamentalnya tetap: membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan luar negeri yang diprioritaskan sesuai dengan tujuan dan harapan seseorang. Yang tak kalah pentingnya adalah pemecahan masalah dan manajemen perselisihan ketika hubungan bilateral memburuk. Dalam banyak pasangan hubungan, kerjasama dan konflik hidup berdampingan, yang semakin memperumit keterlibatan diplomatik. BD melibatkan negara asing individu, di seluruh spektrum mata pelajaran, untuk memajukan tujuan domestik dan internasionalnya sendiri. Fokusnya adalah pada aktivitas yang minatnya, aktual atau laten, paralel atau kongruen. Sama pentingnya adalah identifikasi perbedaan, dan tindakan waspada untuk meredakan masalah potensial. Untuk setiap negara, keamanan adalah tanggung jawab pertama,

dan merupakan inti dari kebijakan luar negeri. Sangat menarik bahwa penyusun pertama praktik diplomasi, Kautilya, yang juga membingkai model teoretis pertama dari keterlibatan antarnegara, pada awalnya disebut 'amoral', dan seorang praktisi diplomasi manipulatif (Rana, 2018).

Ketika negara-negara terlibat secara mendalam, wacana mereka mengandung banyak tema dan, untuk mengejanya, membutuhkan banyak agen dan tingkat kerja. Seringkali, negara-negara yang menikmati pemahaman yang dekat juga menemukan diri mereka berada di sisi yang berlawanan dari isu-isu tertentu, menghasilkan persaingan atau bahkan antagonisme. Sebaliknya, negara-negara yang bermusuhan mungkin menemukan keselarasan yang mengejutkan dalam isu-isu tertentu. Itu menghasilkan dilema: haruskah masalah antar negara pada satu set masalah mempengaruhi totalitas hubungan mereka? Dalam keterlibatan multidimensi dan plurilateral saat ini di antara negara-negara, respons khasnya adalah 'membagi-bagikan' masalah sehingga satu rangkaian kesulitan tidak meracuni seluruh hubungan (Rana, 2018). Tetapi disonansi lintas spektrum antar negara kadang-kadang terjadi jika satu sisi memandang suatu masalah sebagai kepentingan primordial. Efek bersihnya: adegan global menjadi papan catur internasional, menyerupai catur tiga dimensi, di mana setiap aksi menghasilkan arus silang yang membingungkan. Hal ini membuat manajemen diplomasi menjadi lebih kompleks dan menuntut.

#### **2. 2. 2. 2 Kerjasama Regional**

Kerjasama Regional yaitu kerja sama oleh beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Kerjasama ini dapat terjadi karena terbentuknya organisasi yang berperan sebagai pemersatu kepentingan berbagai negara tersebut. Contohnya: Kerjasama negara-negara yang berada di daerah ASEAN, MEE atau NAFTA.

Hubungan antara tingkat analisis dan logika tindakan sosial adalah ortogonal. Pendekatan rasionalis dan konstruktivis dapat mengistimewakan eksogen atau en-



dogen penjelasan. Sementara berfokus pada faktor penyebab di luar wilayah, penjelasan eksogen berbeda dari difusi (Naik dalam volume ini). Kesamaan institusional bukanlah hasil dari pengambilan keputusan yang saling bergantung di mana para aktor di satu wilayah meniru institusi dari yang lain. Sebaliknya, aktor di wilayah yang berbeda mengambil keputusan yang sama dalam menanggapi hal yang serupa tantangan atau masalah eksternal; mereka melembagakan dana moneter daerah sebagai solusi terbaik untuk mencegah krisis keuangan global lainnya, membangun sistem perdagangan emisi regional untuk memitigasi perubahan iklim global atau membentuk mekanisme perlindungan sipil regional untuk menangani bencana alam (Börzel & Risse, 2013). Perbedaan ini mengacu pada peran aktor non-negara. Teori yang berpusat pada negara mengambil negara pemerintah sebagai aktor kunci yang mendorong dan membentuk pembangunan kelembagaan daerah. Pendekatan berbasis masyarakat, sebaliknya, menekankan pentingnya pasar (trans-)nasional dan aktor masyarakat sipil, yang tidak hanya mendefinisikan preferensi atau tekanan negara dan membujuk mereka untuk membangun institusi regional tetapi terlibat dalam pembangunan institusi regional mereka sendiri, dengan atau tanpa keterlibatan negara.

### **2. 2. 2. 3 Kerjasama Multilateral**

Kerjasama Multilateral merupakan bentuk kolaborasi antara dua atau lebih negara. Termasuk organisasi Internasional yang juga merupakan dari bentuk kerjasama multilateral, dimana terdapat interaksi dan hubungan antar beberapa negara dengan kawasan yang berbeda. Contohnya: Kerjasama antar negara di PBB. Kerjasama multilateral dalam perwujudan organisasi seperti WTO (organisasi perdagangan dunia) dan OPEC (negara-negara pengekspor minyak).

Kerjasama Internasional ini merupakan kolaborasi dalam bidang ekonomi yang terjadi antar berbagai bangsa dunia dan tidak ada batasan wilayah sekalipun. Kerjasama ini meliputi beberapa aspek, seperti Perdagangan internasional (barang dan jasa), investasi, hubungan utang-piutang. Serta pertukaran sarana atau faktor produksi. Perdagangan Internasional, pada umumnya terdiri dari bahan baku,

konsultan, barang konsumsi, dan jasa tenaga ahli. Adapun pertukaran media produksi seperti dalam bentuk mesin, teknologi, modal, dan tenaga kerja. Biasanya hubungan hutang-piutang dapat terjadi karena kedua kegiatan diatas. Kerjasama Ekonomi Internasional ini terwadahi oleh PBB seperti: WTO, ILO, ITO, dan IMF.

### **2.2.3 Tiga instistusi penting yang memiliki peran dalam globalisasi**

#### **2. 2. 3. 1 IMF ( International Monetary Fund )**

*International Monetary Fund* yakni lembaga keuangan internasional, fungsinya bertanggungjawab dalam pengaturan sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu persoalan keseimbangan neraca keuangan tiap-tiap negara.

Program IMF terdiri dari pinjaman mata uang asing dan kebijakan persyaratan yang melekat pada pinjaman. Kondisi kebijakan dimaksudkan untuk memperbaiki masalah ekonomi yang membawa negara ke IMF di tempat pertama dan dengan demikian harus dipandu murni oleh pertimbangan teknokratis. Namun, politik di tingkat internasional dan domestik mempengaruhi siapa yang berpartisipasi dalam program IMF dan mengapa. Tujuan dari makalah ini adalah untuk meninjau politik internasional dan domestik dari program IMF.

Di depan internasional, para sarjana telah membahas bagaimana aktor internasional yang kuat, terutama Amerika Serikat, menggunakan IMF untuk memberi penghargaan kepada teman-teman mereka dan menghukum musuh-musuh mereka. Di sisi domestik, para ahli telah berfokus pada bagaimana pemerintah penerima menggunakan persyaratan IMF untuk mendorong kebijakan yang tidak populer melewati oposisi domestik. Literatur internasional dan domestik telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi keduanya belum dipelajari bersama untuk melihat apa implikasinya satu sama lain dan untuk persyaratan IMF. Kisah politik dalam negeri mengharuskan IMF bersedia menghukum suatu negara karena gagal mematuhi persyaratan yang diberlakukan. Jika IMF tidak dapat berkomitmen untuk menghukum ketidakpatuhan, maka pemerintah tidak

mendapatkan pengaruh apa pun atas penentangan terhadap perubahan kebijakan. Namun, jika IMF digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri AS, di mana pinjaman IMF diberikan kepada sekutu AS, hukuman atas ketidakpatuhan tidak kredibel. Jika semua program IMF dengan sekutu AS, tidak akan ada alasan untuk mengharapkan cerita politik dalam negeri dari program IMF untuk bertahan. Tetapi tidak semua program berpihak pada sekutu AS, dan pemerintah yang tidak terlalu disukai oleh AS menghadapi hukuman berat karena ketidakpatuhan. Ketika lembaga keuangan swasta terlibat, IMF bahkan memiliki insentif yang lebih kuat untuk menegakkan persyaratan. Dengan demikian, kisah politik dalam negeri tentang partisipasi IMF mungkin berlaku, tetapi hanya untuk negara-negara di mana ancaman hukuman IMF potensial dapat dipercaya. Dengan cara ini, literatur internasional menginformasikan literatur domestik bahwa program IMF dapat digunakan untuk mendorong kebijakan yang tidak populer hanya dalam situasi tertentu – di mana AS tidak tertarik untuk melindungi negara. Literatur domestik menginformasikan literatur internasional, di sisi lain, bahwa tidak semua negara mencari bantuan IMF hanya untuk pinjaman – kadang-kadang pemerintah ingin kondisi tertentu diberlakukan (Vreeland, 2004).

### **2. 2. 3. 2 World Bank**

Setelah perang dunia II IBRD sangat populer dengan sebutan World Bank, yang mempunyai misi ialah membantu negara berkembang agar bergerak ke arah kemajuan serta memperoleh standar yang lebih tinggi pada semua penduduk yang dimilikinya . Negara berkembaining akan memperoleh pinjaman hutang untuk semua bentuk perkembangan demi tercapainya kemajuan pada negara tersebut.

### **2. 2. 3. 3 WTO ( World Trade Organization )**

*World Trade Organization* yang bertugas untuk memberikan pengawasan terhadap persetujuan yang cukup banyak dimana mampu mengartikan berbagai aturan perdagangan yang ada diantara anggotanya. Prinsip yang dimiliki oleh WTO yakni non-diskriminasi, kemudian liberasi perdagangan, jaminan hubungan

pertahanan yang stabil sehingga mekanisme WTO yang dibangun ini mampu membuat permasalahan perdagangan antar dua negara dapat terpecahkan.

Indonesia-Singapura menjalin hubungann kerjasama pada berbagai bidang. Indonesia dengan kekayaan alamnya dapat melakukan ekspor mengenai hasil alam yang tak dapat diperbarukan, contohnya timah, misyak mentah, dan gas alam. Adapun sumber daya alam yang bisa diolah kembali atau diperbarui seperti daging ataupun sayur-sayuran untuk dikirim ke Singapura. Pembentukan kerjasama yang dilakukan ketika pemerintahan SBY memiliki tujuan dalam menguatkan hubungan bilateral. Pemerintah ini umumnya akan menjalin kerja sama pada bagian pembelaan negara dengan perjanjian kontrak terorisme dan perjanjian ekstradisi yang diperbincangkan pada tahun 2006 ketika Presiden SBY masih sering mengunjungi Singapura dalam rangka pembahasan mengenai perjanjian tersebut. Indonesia dan Singapura memang sudah tergabung pada organisasi kesehatan dunia (WHO). Negara Indonesia-Singapura juga masih menjalin kerjasama pada lingkup sosial masyarakat seperti ketika terjadi bencana alam.

Berbekal dari argumen aliran metodologi yang sangat populer dengan menitikberatkan “*thick description*” memaparkan bahwa pemahaman dari hubungan politik ekonomi akan dikajian ulang melalui perbandingan dugaan yang melatarbelakangi berbagai “*views of political and economic behavior*”. Apabila sebuah teori yang berpedoman pada sebuah dugaan, mencapai target untuk menjelaskan isu dan fenomena sebaik mungkin maka dugaan tersebut memiliki manfaat sehingga dianggap berguna. Namun apabila tidak maka berlaku sebaliknya. Sebagaiman menurut Frieden dan Lake bahwa:

***“A first step in studying International Political Economy is to understand the assumption made by each of the... perspectives”***

**(Frieden dan Lake 1991: 5).**

Definisi perspektif yang digunakan pada hal ini dapat dikatakan paradigma yang dimaknai sebagai dasar konsep dan dugaan pada eksplanasi

teoritik. Dasar konsep dan dugaan inilah yang memunculkan atau membatasi berbagai pertanyaan yang diajukan serta jawaban yang akan diberikan (Gill and Law, 1988: 17).

Perspekti Liberalisme, pada awal kehadirannya digunakan sebagai alternatif yang direkomendasikan para pengkritik merkantilisme. Adam Smith dan David Ricardo menganggap bahwa pengawasan ekonomi domestik dan internasional terlalu berlebihan sehingga ditentang keras. Perspektif liberal pun kemudian menyatakan suatu argumen melalui cara yang sangat efektif dalam meningkatkan kekayaan nasional, yakni melalui upaya untuk membiarkan pertukaran yang terjadi antar personal dalam ekonomi baik domestik atau Internasional agar bisa berjalan bebas tanpa batas atau selanjutnya disebut pasar bebas. Dengan demikian, apabila individu dibebaskan dalam mengejar kepentingan sendiri pada ekonomi perdagangan yang berpedoman pada struktur maupun komposisi dari faktor produksinya sendiri, maka kesejahteraan dari sebuah golongan personal dalam satuan bangsa secara komprehensif bisa ditingkatkan kembali.

Kaum liberal menyatakan suatu asumsi bahwa, individu adalah aktor utama yang yang bertindak secara rasional atau masuk akal dan senantiasa berusaha mendapatkan sesuatu secara maksimal. Tindakan rasional merupakan suatu tindakan yang berdasar oleh kalkulasi untung-rugi terkait banyak pilihan kemungkinan. Kaum liberal meyakini bahwa, ekonomi internasional memiliki sifat harmonis dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pada perdagangan internasional ini akan memiliki kebebasan dari berbagai batasan atau peraturan yang ada sehingga setiap individu yang terlibat memiliki potensi mendapatkan keuntungan dari barang ataupun jasa yang telah tersedia. Oleh karenanya, aspek kesejahteraan pun terus mengalami peningkatan.

Dalam perspektif ini, negara memiliki peran yang terbatas. Terdapat banyak bentuk dan jenis intervensi dari pemerintah terutama pada bidang ekonomi, baik merupakan unsur kesengajaan atau tidak namun telah membatasi pasar dimana dengan hal itu yang mampu melakukan pencegahan terkait terjadinya suatu potensi perdagangan yang menguntungkan. Pemerintah seharusnya memiliki

peran dalam menyediakan fondasi yang tepat agar mekanisme pasar berjalan lancar. Contohnya adalah adanya penjaminan keamanan, perlindungan hak kepemilikan sehingga menghindari praktik monopoli maupun persaingan yang kurang sehat, serta pembangunan infrastruktur.

Berkaitan dengan upaya dalam menentang kaum merkantilis, kaum liberal menyampaikan pendapat yaitu bahwa kaitan ekonomi internasional dapat diubah “*positive sum-game*”. Berarti, masing-masing personal memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari proses hubungan ekonomi. Anggapan ini juga meyakini akan terciptanya keselarasan yang fundamental dalam kepentingan nasional maupun kepentingan ekonomi internasional. Oleh sebab itu, tidak beralasan jika terjadi konflik internasional. Terkait kepentingan nasional dengan nosmopolitan yakni kepentingan mengenai pasar bebas, maka kaum liberal pun menyatakan argumen agar negara seharusnya tidak ikut campur terkait transaksi ekonomi yang sudah melintasi pada batas nasional. Kaum liberal pun kemudian mempercayai bahwa dalam pemenuhan kepentingan nasionalnya sendiri, setiap negara wajib memiliki sifat kooperatif terutama pada hubungan ekonomi yang dijalin dengan negara lainnya.

Liberalisme juga menyangkal fakta tidak seluruh bangsa adanya suatu kemampuan yang sama dalam berkompetisi. Hal ini disebabkan karena ada perbedaan dalam struktur faktor produksi. Berdasarkan anggapan politik dan liberal ekonomi, hal tersebut merupakan bidang terpisah sehingga pemerintahan memegang peran yang cukup terbatas terkait pengelolaan pasar agar menjamin perdagangan berpotensi untuk menghasilkan keuntungan apabila terlaksana dengan optimal. Ketika pasar mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka tidak akan ada alasan ekonomi yang memicu terjadinya konflik politik mengingat setiap pihak yang terlibat akan memperoleh keuntungan.

Alasan Singapura melakukan liberalisasi adalah disebabkan Singapura sebagai negara kecil tidak memiliki SDA. Joseph Nye berargumentasi bahwa Singapura mengandalkan kekuatan ekonomi yaitu kekuatan ekonomi *Soft Power*. Perihal tersebut dapat dibuktikan dari Singapura memiliki perkembangan

perekonomian yang besar serta bisa berjuang untuk kepentingan di perundingan internasional, yaitu perundingan multilateral. *Sof Power* digunakan untuk menjaga keamanan ekonomi politik di negara Singapura.

**2.2.4 Upaya pemerintah Singapura dalam melakukan liberalisasi dan negosiasi multilateral: “*supply security, market access security, Finance-credit security, dan techno-industrial capability security*” (Christopher M. Dent, 2001:7-8).**

#### **2. 2. 4. 1 Supply Security.**

Singapura merupakan negara yang tidak cukup luas sehingga sumber daya alam yang dimiliki juga terbatas, pasokan SDA yang diperoleh oleh Singapura berasal dari negara lain. Keadaan inilah yang menjadikan Singapura harus melakukan hubungan baik dengan negara tetangga seperti negara Asia Tenggara. Hal ini bisa dilakukan melalui AFTA dimana Singapura melakukan upaya dalam mengatasi hambatan ekspor dari negara penyedia sumber daya alam seperti Indonesia dan Malaysia.

Isu cadangan air dan minyak adalah isu yang muncul akibat negosiasi antara Singapura dengan negara-negara tetangga. Sebagai contoh hal tersebut adalah upaya ekspansi jangkauan Singapura ke Batam ataupun Johor melalui penanaman modal sebagai upaya untuk mengamankan pasokan SDA tersebut. Dalam hal ini, timbul kewajiban AFTA dan WTO pada lingkup investasi yang bebas sehingga Singapura berusaha melakukan pencarian pada sumber yang bisa memasok sumber daya alam kepada negara Singapura dengan mudah.

#### **2. 2. 4. 2 Access Security (Keamanan Pasar).**

Singapura memiliki ketergantungan yang besar pada pedagang, khususnya terkait ekspor manufaktur dan jasa, dimana hal ini yang dapat menyebabkan akses pasarnya sangat esensial. Singapura merasa khawatir ketika semua negara berkembang tidak membuka jalur ekspor Singapura, sehingga akan

menimbulkan dampak resesi ekonomi dalam negeri. Menurut Singapura negara-negara di Asia Tenggara merupakan pasar baru bagi produksi industrinya. Singapura bahkan tetap aktif dalam melaksanakan hubungan kerjasama bilateral yang dilakukan pada negara yang dianggap mampu memberi keuntungan bagi mereka. Negara Singapura ini menjalankan kerjasama perdagangan bebas bilateral tidak hanya dengan Indonesia, melainkan juga dengan New Zealand pada “*Agreement between New Zealand and Singapore on a Closer Economic Partnership*”.

#### **2. 2. 4. 3 Finance Credit Security.**

Sebagai negara kecil, Singapura memanfaatkan secara optimal terkait cadangan devisa yang besar serta adanya sistem ekonomi yang sehat. Ketika terjadi perundingan multilateral, adanya kebebasan investasi menjadikan Singapura memiliki keyakinan dalam meningkatkan keamanna finansial yang dilakukan dengan cara menjalankan investasi dengan besar-besaran pada luar negeri. Bentuk investasi ini terbagi menjadi dua yakni langsung ataupun investasi portofolio yang diketahui mampu aspek yang membuat cadangan devisa meningkat.

#### **2. 2. 4. 4 Techno Industrian Capability Security.**

Singapura berkeinginan untuk memajukan industry yang memiliki sifat teknologi tinggi dan pengetahuan dimana sering disebut dengan *Knowledge-Based Economy* yang dianggap menjadi industri utama. Salah satu progamnya yaitu upaya regionalisasi GLC (*goverment linked corporation*) dimana hal tersebut merupakan suatu cara yang dilakukan agar bisa memperoleh akses terhadap teknologi. Cara tersebut yang mampu ditempuh dengan cara negosiasi bileteral maupun negosiasi multilateral yang dilakukan dengan negara maju. Misalnya adalah ketika pemerintah berusaha untuk memajukan industri tersebut dengan cara melakukan investasi GLC pada negara maju seperti halnya upaya yang dilakukan oleh Singtel.



### **2.2.5 Tiga karakteristik upaya-upaya kebijakan ekonomi Singapura :**

- a. Pemerintah Singapura diketahui berencana untuk dapat meningkatkan lokasi aktivitas finansial Singapura, salah satunya yakni berupaya bahwa Singapura mampu menjadi pusat finansial di kawasan.
- b. Ada upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga terjadinya perbedaan secara insentif ataupun hambatan yang berkaitan dengan aspek finansial domestik dengan internasional. Hal ini yang sering dikenal dengan nama pagar pemisah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada aktivitas finansial domestik terutama dari gangguan eksternal yang mungkin mengintai. Gangguan tersebut khususnya transaksi internasional dengan pergerakan yang mampu membuat ekonomi Singapura menjadi goyah.
- c. Adanya keinginan memberikan jaminan mengenai ketahanan dan kematangan yang berasal dari finansial yang dimiliki oleh Singapura. Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Central maupun industri finansial lainnya disebut-sebut sebagai suatu metode yang dilakukan demi mencapai tujuan. Adapun motif makronya yakni membuat sistem finansial lebih stabil secara keseluruhan. Sementara motif mikronya yakni memberikan perlindungan pada depositor maupun investor individual melalui cara memainkan peran yang mampu memberikan dukungan regulasi ataupun supervisi dari bank.

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat ide politik yang dimaksud yakni Singapura ingin membuat kedudukannya salah satu pusatnya perekonomian. Implementasi *pagar terpisah* ini akan mempengaruhi terjadinya implementasi liberalisasi terutama terkait kebijakan ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Singapura. Pemerintah Singapura pun juga dianggap cukup berlebihan ketika menerapkan berbagai pembatas untuk memberikan batasan pada arus masuk dari institusi asing.

Perdagangan Internasional yakni suatu perdagangan yang dilaksanakan antar negara maupun pemerintah dengan negara lain dimana ketika menjalani hubungan perdagangan tersebut harus berdasarkan kesepakatan yang disetujui kedua belah

pihak yang terlibat pada perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional ini merupakan perdagangan dimana dilaksanakan oleh penduduk dalam suatu negara dengan penduduk negara lainnya berdasarkan kesepakatan yang terjadi bersama. Penduduk yang dimaksud bisa berupa antar personal, antara personal dengan lembaga sebuah negara ataupun lembaga suatu negara dengan pemerintah negara lain (Setiawan dan Lestari, 2011:1)

Kegiatan ini bisa terjadi akibat terjalinnya hubungan ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa dan alih teknologi sehingga akhirnya mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan bebas dapat menstimulus produk industri dalam negeri agar memiliki daya saing yang lebih kompetitif dengan produk impor, baik pada lingkup dalam negeri atau di pasar ekspor. Pemmasalahan yang di alami Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ialah Indonesia sendiri sulit membendung terjadinya lonjakan produk impor. Maka, antisipasi yang dilakukan mengenai permasalahan tersebut ialah diperlukan peraturan perbuatan mengamankan untuk usaha perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Untuk memberikan dukungan pada aktivitas bisnis antar negara ini, dibutuhkan suatu pijakan hukum yang berbentuk peraturan, baik secara rasional ataupun internasional. Dengan demikian, Indonesia masuk sebagai anggota *world trade* berdasarkan ratifikasi UU Tahun 1994 No 7 terkait pengesahan WTO dimana memberi konsekuensi kepada Indonesia yakni Indonesia harus selalu patih terhadap keseluruhan hasil kesepakatan yang diambil dalam forum WTO serta melakukan suatu tindak harmonisasi pada peraturan perundang-undangan nasional sesuai hasil kesepakatan WTO (Sood, Muhammad, 2005:7).

Dalam melaksanakan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional memang sangat rumit dan kompleks. Itu terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Barang wajib dikirim maupun diangkut dari suatu negara menuju negara lain.

2. Pembeli (*Buyyer*) maupun penjual (*Seller*) wajib dipisahkan oleh batas-batas kenegaraan.
3. Sumber daya alam yang berbeda.

#### **2. 2. 5. 1 Free Trade Zone**

Free Trade Zone (FTZ) yaitu wilayah yang memiliki beberapa hambatan perdagangan seperti tarif dan kouta yang dihapuskan dapat membuat urusan birokrasi semakin mudah. Pelaksanaan hal ini diharapkan mampu memunculkan berbagai bisnis yang baru dan investor asing. Penerapan FTZ di wilayah Batam ini merupakan keterangan yang tercatat dalam Undang-Undang Tahun 2007 No.44 sekaligus aturan pelaksanaan dibawahnya.

Free Trade Zone juga merupakan wilayah yang memiliki pembatas fisik yang cukup jelas, dengan begitu kawasan ini mempunyai akses terbatas dalam wilayah setiap negara. FTZ berfungsi sebagai media perdagangan bebas, penyimpanan barang, bongkar muat dan manufakturing dengan keterbatasan akses yang diawasi oleh petugas bea cukai khususnya. Semua barang yang diperoleh dari luar negara bisa dimasukkan tanpa dikenakan biaya tambahan seperti bea cukai import. Free Trade Zone bisa dikatakan dalam istilah lain, sesuai dengan sebutan di setiap wilayahnya, seperti: Pergudangan Bebas (*Free Warehouses*),Pelabuhan Bebas (*Free Ports*), dan Wilayah Perdagangan Luar Negeri (*Foreign Trade Zone*).

#### **2.3 Hipotesis Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah serta konsep kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas, maka penulis menarik sebuah hipotesis, yakni ***“Kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Singapura dalam luang lingkup free trade zone diimplementasikan dengan konsisten dapat mendorong pembangunan ekonomi ke dua negara meningkat signifikan dari berbagai sektor, baik infrastruktur dan teknologi.”***

## 2.4 Oprasionalisasi Indikator Variable

| Variable dalam Hipotesis  | Indikator  | Verifikasi   |
|---|--|--|
| <p>Variable Bebas :</p> <p><i>“dengan adanya hubungan bilateral dan kerjasama Ekonomi antara Indonesia dengan Singapura dalam luang lingkup FTZ.”</i></p>   | <p>1. Free Trade Zone menjadi peluang untuk kepentingan ekonomis nasional.</p>   | <p>Liberalisasi perdagangan menyebabkan perdagangan intra-negara berkembang dan ini meningkatkan kesejahteraan. Hal ini telah menunjukkan bahwa, selama negara anggota cukup besar, efekterakhir akan mendominasi dan pembentukan FTZ akan menguntungkan kedua negara (Bond et al., 2004).</p> |
| <p>Variable Terikat :</p> <p><i>“Konsistensi hubungan bilateral Indonesia-Singapura dan melakukan Kerjasama Ekonomi dapat memberikan domino terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kedua negara dalam sektor infrastruktur dan teknologi.”</i></p> | <p>1. Kerjasama Indonesia dan Singapura di sektor infrastruktur dan teknologi.</p> <p>2. Pendetanganan nota kesepahaman kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam</p> | <p>1. Kepentingan nasional Indonesia adalah perlunya menarik investasi asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kepentingan nasional Singapura adalah melakukan investasi di luar negeri karena keterbatasan sumber</p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>membangun destinasi wisata dan pelabuhan.</p> | <p>daya alam dan lahan. Pulau Batam ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas karena potensi ekonominya serta kedekatan geografisnya dengan Singapura. Kerja sama investasi bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Singapura berpengaruh positif dengan adanya kebijakan FTZ dan pembentukan kerangka kerja bilateral dalam hubungan ekonomi antar negara Indonesia dan Singapura pada sektor infrastruktur dan teknologi (Wulandari, 2011).</p> <p>2. Argumen neoliberalisme (biasanya implisit) yang mengungkapkan</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>bahwa masalah penyaluran pada umumnya kurang penting dibandingkan potensi keuntungan, dan lebih baik jika sebagian bersumber dari perhatian substatifnya dengan fenomena-fenomena dimana keuntungan bersama yang maksimal diyakini mungkin terjadi, seperti melindungi lingkungan, dibandingkan dengan sebuah konflik. atas beberapa nilai seperti status, wilayah, dan pengaruhnya (jika bukan mayoritas). Seorang neoliberal akan berargumen bahwa kemanjuran pengaturan ini menunjukkan dampak independennya dan menyiratkan bahwa</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>mereka akan menghasilkan beberapa efek yang baik jika mereka digunakan dalam kasus lain neoliberalisme berpendapat bahwa negara tidak semuanya sama dan preferensi sebagian muncul secara internal. Sejauh ini benar, pengaturan internasional dapat mengubah kekuatan, kepercayaan, dan tujuan kelompok dalam masyarakat dengan cara yang akan mempengaruhi hubungan luar negeri (Soepardi, 2016)s.</p> |
|--|--|---|

## 2.5 Alur Skema Penelitian





